

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU No.36 Tahun 2008).

Pajak memiliki peran yang sangat vital bagi terciptanya kemakmuran rakyat dan bersifat memaksa sehingga setiap Warga Negara Indonesia wajib mematuhi. Berdasarkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 jumlah belanja pemerintah adalah sebesar 2.461,1 T sedangkan target penerimaan perpajakan adalah sebesar 1.786,4 T atau sebesar 82,50 % dari total rencana pendapatan negara sebesar 2.165,1 T. Dengan demikian belanja pemerintah yang dibiayai dari perpajakan adalah sebesar 72,58 % (www.kemenkeu.go.id).

Belanja pemerintah yang diperoleh dari pajak tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan secara tidak langsung. Manfaat yang diperoleh antara lain fasilitas umum, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, biaya

pendidikan, dan juga kesehatan. Selain itu dana pajak juga digunakan untuk membayar gaji para Aparatur Sipil Negara , TNI dan POLRI.

Menurut Hasanah & Indriani (2013) di Indonesia pemungutan pajak dilakukan dengan menganut tiga sistem yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding system*. Ketiga sistem ini mempunyai keistimewaan masing-masing, namun yang memiliki peran lebih dominan adalah pada *self assessment system* karena diterapkan pada pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta sebagian pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Siti Resmi (2017:10) menjelaskan bahwa sistem *self assestment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini maka inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib pajak.

Pada sistem pemungutan *self assestment system* wajib pajak melakukan perhitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang Undang No.36 Tahun 2008, yaitu setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (selanjutnya disebut SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

SPT yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang Undang No.36 Tahun 2008, yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT tersebut meliputi SPT Tahunan dan SPT Masa yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang disampaikan oleh Orang Pribadi (OP) ataupun Badan.

SPT Tahunan memuat pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan SPT Masa memuat pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas barang Mewah (PPnBM).

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan Undang-Undang Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT.

Dengan pelaporan wajib pajak yang benar, lengkap, dan jelas maka target penerimaan pajak yang telah ditetapkan negara dapat tercapai. Namun faktanya dari target dan realisasi penerimaan perpajakan dalam 5 tahun terakhir belum pernah melampaui target sebesar 100 %. Target penerimaan pajak ini merupakan

target yang ditetapkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam APBN, berupa PPh Migas, PPh Non-Migas, PPN, PPnBM, dan PBB.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Realisasi Penerimaan Pajak
2014	1.072 T	985 T	91,86%
2015	1.294 T	1.060 T	81,97%
2016	1.355 T	1.105 T	81,61%
2017	1.283 T	1.151 T	89,67%
2018	1.423 T	1.313 T	92,23%

Sumber: Laporan Keuangan DJP tahun 2018 (Audited)

Pada tahun 2014 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 1.072 T dan realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 985 T atau sebesar 91,86 %. Pada tahun 2015 target penerimaan meningkat cukup tinggi sebesar Rp. 222 T atau sebesar 20,70 % dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 1.294 T, namun realisasi penerimaan perpajakan hanya mencapai 81,97 %.

Tahun 2016 target perpajakan juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 61 T menjadi sebesar Rp. 1.355 T dan realisasi penerimaan mencapai 81,61 %, pada tahun 2017 target penerimaan perpajakan turun sebesar Rp. 72 T atau 5,31 % menjadi Rp. 1.283 T dan realisasi penerimaan mencapai 89,67 %. Pada tahun

2018 target penerimaan kembali meningkat sebesar Rp. 140 T menjadi 1.423 T sedangkan realisasi penerimaan pajak sebesar 92,23%.

Selain data penerimaan perpajakan salah satu alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu Negara adalah dengan *tax ratio*. *Tax ratio* merupakan perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (www.pajak.go.id).

Tabel 1.2
Capaian *Tax Ratio* Indonesia

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Tax Ratio	13,1%	11,6%	10,8%	10,7%	11,8%

Sumber: www.pajak.go.id

Jika dilihat dari capaian *tax ratio* Indonesia, mulai dari tahun 2014 s.d. 2017 terus mengalami penurunan. Capaian terendah adalah sebesar 10,7 % pada tahun 2017.

Berdasarkan kondisi penerimaan perpajakan dan capaian *tax ratio* di Indonesia yang belum dapat memenuhi target, masih terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya salah satunya adalah dengan melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut Frank et. al. dalam Liana et. al. (2013), agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*.

Beberapa kejadian yang mengandung unsur tindakan agresivitas pajak antara lain, pertama pada tahun 2014 terjadi kasus agresivitas pajak yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan Astra Internasional Tbk (ASII) yaitu

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dengan modus *transfer pricing*. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up* (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *Complete Knock Down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Sayangnya, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah ini disebut *transfer pricing*. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah. Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia agar perusahaan bisa meraup pendapatan maksimal. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura (www.investigasi.tempo.com).

Kejadian kedua adalah kasus agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melalui PT. Bentoel Internasional Investama pada periode 2013 – 2015 dengan melakukan upaya penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian negara dengan taksiran sebesar US\$ 14 juta per tahun, dengan modus yang digunakan melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015 dan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Kasus ini dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network pada tanggal 8 Mei 2019.

Cara pertama dengan melalui pinjaman intra-perusahaan yaitu, Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia.

BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%

Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per

tahun. Meskipun pada akhirnya Indonesia-Belanda merevisi perjanjian mereka dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%. Namun aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah selesai melakukan transaksi pembayaran bunga utang.

Cara kedua dengan, pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Biaya tersebut digunakan untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited sebesar US\$ 4,3 juta. Dengan demikian pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% seharusnya sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Namun, dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas merk dagang sebesar 15% dari US\$ 10,1 juta atau sebesar US\$ 1,5 juta. Sedangkan biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Biaya IT tidak disebutkan dalam perjanjian, namun karena mirip dengan royalti, laporan tersebut mengasumsikan potongan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,7 juta. Sehingga seharusnya pajak yang dibayarkan adalah sebesar US\$ 4,9 namun hanya dibayarkan US\$ 2,2 saja (<https://nasional.kontan.co.id>).

Kejadian selanjutnya terjadi pada PT Garuda Metalindo, dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan) yang cukup signifikan. Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek

mencapai Rp 200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp 48 miliar.

Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya mengatakan, peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (*capital expenditure/capex*) hingga pertengahan tahun depan. Adapun sumber dana capex berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia. Namun, yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban (<http://investor.id>).

Kejadian terakhir terjadi pada kasus agresivitas pajak yang terjadi pada PT Adaro Energy Tbk. Dengan modus *profit shifting*. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah

mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia.

Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun.

Global Witness mengatakan laporan keuangan menunjukkan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 juta sebelum 2009 menjadi USD 55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70 persen batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia.

Peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura, dengan pengenaan rata-rata pajak tahunan 10 persen. Sedangkan keuntungan dari komisi perdagangan batu bara perseroan di Indonesia mungkin akan dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat lebih tinggi secara rata-rata tahunan sekitar 50 persen. Laporan itu juga menyebutkan, pada 2008, Adaro membayar USD 33 juta untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak Indonesia atas aturan sebelumnya dengan Coaltrade. Sebagian besar dari keuntungan yang terdaftar di Singapura tampaknya telah dipindahkan ke luar negeri, ke salah satu anak perusahaan Adaro di Mauritius, yang tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum 2017 dan mungkin masih belum (www.merdeka.com).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

1. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Raisa Fitri dan Mulyaningtyas (2018), Sri Ayem & Afik Setyadi (2019), RR. Maria Yulia Dwi Rengganis & I.G.A.M Asri Dwijaya Putri (2018), dan Luke & Zulaikha (2018).
2. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Poppy A. Sumitha Lestari (2019), Shelly Novitasari (2017), Ruth Rogate Octaviani & Sofie (2018), Donny Indradi (2018), dan Agus Taufik Hidayat & Eta Febriana Fitria (2018).
3. Koneksi Politik yang diteliti oleh Poppy A. Sumitha Lestari (2019) dan Agung Prasetyo Nugroho Wicakso (2017).
4. *Inventory Intensity* yang diteliti oleh Luke & Zulaikha (2016) dan Agus Taufik Hidayat & Eta Febriana Fitria (2018).
5. *Leverage* yang diteliti oleh Furqon Nurhandono & Amrie Firmansyah (2017), Liana Susanto, dkk (2018), Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya (2015), Ruth Rogate Octaviani & Sofie (2018), dan Agus Taufik Hidayat & Eta Febriana Fitria (2018).
6. *Profitability* yang diteliti oleh Liana Susanto, dkk (2018), Sri Ayem & Afik Setyadi (2019), Luke & Zulaikha (2018), dan dan Agus Taufik Hidayat & Eta Febriana Fitria (2018).
7. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Liana Susanto, dkk (2018), Shelly Novitasari (2017), Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya (2015), Sri Ayem & Afik Setyadi (2019), dan Luke & Zulaikha (2018).

8. Dewan Direksi yang diteliti oleh RR. Maria Yulia Dwi Rengganis & I.G.A.M Asri Dwijaya Putri (2018) dan Hanifah Hanim & Fatahurrazak (2018).
9. Komite Audit yang diteliti oleh Liana Susanto, dkk (2018), Shelly Novitasari (2017), Sri Ayem & Afik Setyadi (2019), dan RR. Maria Yulia Dwi Rengganis & I.G.A.M Asri Dwijaya Putri (2018).
10. Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Liana Susanto, dkk (2018), Ruth Rogate Octaviani & Sofie (2018), Shelly Novitasari (2017), dan Alfred Amril, Dwi Puspita & Popy Fauziati (2015).
11. Komisaris Independen yang diteliti oleh Liana Susanto, dkk (2018), Ruth Rogate Octaviani & Sofie (2018), Shelly Novitasari (2017), Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya (2015), Alfred Amril, Dwi Puspita & Popy Fauziati (2015), RR. Maria Yulia Dwi Rengganis & I.G.A.M Asri Dwijaya Putri (2018) dan Hanifah Hanim & Fatahurrazak (2018).
12. Lindung Nilai yang diteliti oleh Furqon Nurhandono & Amrie Firmansyah (2017), Bendi Devi & Subagio Efendi (2018) dan Yoojin Lee (2016).
13. Manajemen Laba yang diteliti oleh Furqon Nurhandono & Amrie Firmansyah (2017), Shelly Novitasari (2017), Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya (2015), Raisa Fitri dan Mulyaningtyas (2018), Alfred Amril, dan Dwi Puspita & Popy Fauziati (2015).
14. Likuiditas yang diteliti oleh Ruth Rogate Octaviani & Sofie (2018), Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya (2015) dan Donny Indradi (2018).

Tabel 1.3
Faktor – Faktor Yang Diduga Mempengaruhi Agresivitas Pajak Berdasarkan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Pengungkapan CSR	Capital Intensity	Koneksi Politik	Inventory Intensity	Leverage	Profitability	Ukuran Perusahaan	Dewan Direksi	Komite Audit	Kepemilikan institusional	Komisaris Independen	Lindung Nilai	Manajemen Laba	Likuiditas
1	Furqon Nurhandono, Amrie Firmansyah	2017	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	×	√	-
2	Poppy A. Sumitha Lestari	2019	-	√	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Liana Susanto, dkk	2018	-	-	-	-	×	√	×	-	×	×	×	-	-	-
4	Shelly Novitasari	2017	-	×	-	-	-	-	×	-	×	√	√	-	√	-
5	Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya	2015	-	-	-	-	×	-	√	-	-	-	×	-	√	×
6	Bendi Devi & Subagio Efendi	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Pengungkapan CSR	Capital Intensity	Koneksi Politik	Inventory Intensity	Leverage	Profitability	Ukuran Perusahaan	Dewan Direksi	Komite Audit	Kepemilikan institusional	Komisaris Independen	Lindung Nilai	Manajemen Laba	Likuiditas
7	Raisa Fitri & Mulyaningtyas	2018	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
8	Alfred Amril, Dwi Puspita, & Popy Fauziati	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	×	-
9	Sri Ayem & Afik Setyadi	2019	√	-	-	-	-	√	√	-	√	-	-	-	-	-
10	Ruth Rogate Octaviani & Sofie	2018	-	√	-	-	√	-	-	-	-	×	√	-	-	√
11	Donny Indradi	2018	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
12	Findria Prameswari	2017	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-
13	RR. Maria Yulia Dwi Rengganis & I.G.A.M Asri Dwijaya Putri	2018	√	-	-	-	-	-	-	×	×	-	×	-	-	-
14	Luke & Zulaikha	2016	×	-	-	×	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Pengungkapan CSR	Capital Intensity	Koneksi Politik	Inventory Intensity	Leverage	Profitability	Ukuran Perusahaan	Dewan Direksi	Komite Audit	Kepemilikan institusional	Komisaris Independen	Lindung Nilai	Manajemen Laba	Likuiditas
15	Agus Taufik Hidayat & Eta Febriana Fitria	2018	-	√	-	×	√	×	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono	2017	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Hanifah Hanim & Fatahurrazak	2018	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	×	-	-	-
18	Yoojin Lee	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-

Sumber : data diolah penulis

Keterangan:

1. √ = Berpengaruh Signifikan
2. × = Tidak Berpengaruh Signifikan
3. - = Tidak Meneliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhandono dan Firmansyah (2017) dengan judul “Lindung Nilai, *Financial Leverage*, Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak”. Adapun variabel yang diteliti terdiri dari: variabel dependen dan variabel independen. Agresivitas Pajak menjadi variabel dependen yang diteliti. Variabel independen yang diteliti adalah lindung nilai, *financial leverage*, dan manajemen laba. Unit analisis dalam penelitian Nurhandono dan Firmansyah (2017) adalah Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2015. Populasi pada penelitian Nurhandono dan Firmansyah (2017) sebanyak 24 Perusahaan yang terdiri dari perusahaan yang terdaftar di BEI selain Sektor Keuangan dan Konstruksi Bangunan.

Unit Observasi dalam penelitian Nurhandono dan Firmansyah (2017) adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, data yang digunakan dalam laporan posisi keuangan berupa data total piutang, total aset, dan total utang. Data yang digunakan dalam laporan laba rugi berupa beban pajak dan laba sebelum pajak. Data yang digunakan dalam laporan arus kas berupa arus kas dari operasional perusahaan serta data yang digunakan dalam catatan atas laporan keuangan berupa nilai notional lindung nilai. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah *purposive sampling*. Dengan kriteria antara lain perusahaan yang terdaftar di BEI yang listing dari tahun 2011 s.d. 2015, perusahaan sektor non keuangan dan konstruksi bangunan, dan perusahaan yang melakukan transaksi lindung nilai.

Hasil penelitian Nurhandono dan Firmansyah (2017) menunjukkan bahwa pengungkapan lindung nilai tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan *financial leverage* serta manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu: penelitian sebelumnya hanya memfokuskan untuk perusahaan *non financial* yang memiliki instrument derivatif dengan tujuan lindung nilai kemudian rentang waktu yang digunakan terbatas pada tahun 2011 - 2015.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu unit analisis, rentang waktu penelitian dan indikator variabel yang digunakan. Unit analisis dalam penelitian Nurhandono dan Firmansyah (2017) adalah Perusahaan yang terdaftar di BEI selain sektor keuangan, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis memilih fokus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri. Alasan pemilihan unit analisis ini karena menurut Menteri Perindustrian Indonesia, Airlangga Hartarto (2018) industri manufaktur memberikan kontribusi tertinggi sebagai penyector pajak. Pada tahun 2017 sektor ini menjadi menyumbang penerimaan PPh Non Migas sebesar 31,8 %. Pada periode Januari-April 2018, sumbangan sektor manufaktur ini mencapai Rp103,07 triliun dengan mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 11,3 persen (www.kemenperin.go.id). Penelitian ini menitikberatkan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri, sektor ini terdiri dari beberapa subsektor diantaranya otomotif dan komponen, tekstil dan garmen, elektronika, kabel dan alas kaki. Alasan penelitian dilakukan pada sektor tersebut karena menurut

Direktur Utama Investa Saran Mandiri, Hans Kwee (2019) banyak emiten pengisi sektor aneka industri yang bisnisnya berorientasi ekspor (insight.kontan.co.id). Karena itu perusahaan pada sektor aneka industri melakukan banyak transaksi utang-piutang dengan menggunakan valuta asing, hal ini akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan kebijakan lindung nilai.

Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian Nurhandono dan Firmansyah (2017) adalah tahun 2011 – 2015, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan nanti, penulis akan menggunakan rentang waktu dari tahun 2014 – 2018. Salah satu alasan pemilihan rentang waktu ini dikarenakan pada tahun 2016 – 2017 terdapat kebijakan *tax amnesty* yang dituangkan dalam UU No.11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang dimulai dari bulan Juli 2016 hingga April 2017. Menurut Fadhila dan Handayani (2019) perusahaan yang berpartisipasi dalam *tax amnesty* cenderung melakukan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan yang tidak berpartisipasi dalam program *tax amnesty*, sehingga variabel agresivitas pajak akan mengalami peningkatan seiring dengan banyaknya perusahaan yang berpartisipasi dalam program *tax amnesty*. Selain itu, dalam rentang waktu 2014 – 2018 realisasi penerimaan perpajakan DJP belum pernah mencapai 100% (www.kemenkeu.go.id).

Variabel agresivitas pajak pada penelitian Nurhandono dan Firmansyah (2017) dinilai dengan menggunakan indikator Book Tax Difference (BTD) sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, akan menggunakan *Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Rate* (GAAP ETR) atau tarif pajak efektif berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Alasan penggunaan GAAP ETR menurut Chen, et. al. dalam Astuti dan Aryani (2016) penggunaan GAAP ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Menurut Hanlon dan Heitzman dalam Rosidy dan Nugroho (2019) pendekatan GAAP ETR lebih mampu menggambarkan penghindaran pajak dibandingkan dengan LTD.

Variabel lindung nilai pada penelitian Nurhandono dan Firmansyah (2017) dinilai dengan menggunakan indikator *HED* berupa kepemilikan instrumen lindung nilai perusahaan yang diperoleh dengan menggunakan nilai notional lindung nilai sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, variabel lindung nilai diukur menggunakan rasio likuiditas valuta asing. Alasan penggunaan rasio likuiditas valuta asing mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.PBI/16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank seperti yang digunakan oleh Situmeang dan Wiagustini (2018), sebagai wujud dari lindung nilai, perusahaan diwajibkan untuk memiliki rasio likuiditas valuta asing paling rendah sebesar 70%.

Dalam penelitian Nurhandono dan Firmansyah (2017) salah satu variabel independennya adalah *financial leverage*, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan istilah *leverage*. Penggantian istilah ini dilakukan agar tidak ada kekeliruan mengenai istilah *financial leverage*, dikarenakan menurut Martono dan Harjito (2008:301) *financial leverage* merupakan

penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham (*earning per share*, EPS).

Jika dalam penelitian Nurhandono dan Firmansyah (2017) variabel LEV diukur dengan membandingkan nilai utang dibagi dengan aset tahun t-1, pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis variabel LEV diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Alasan penggunaan indikator ini merujuk pada pengertian *leverage* menurut Agus Sartono (2010:120) yang menjelaskan bahwa *leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasi perusahaan. Untuk mengukur seberapa banyak utang yang digunakan dibandingkan dengan modal yang dimiliki untuk melakukan suatu kegiatan perusahaan, lebih tepat jika pengukuran dilakukan dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Variabel manajemen laba pada penelitian Furqon Nurhandono dan Amrie Firmansyah (2017) dihitung menggunakan model Kothari, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis variabel manajemen laba akan diukur menggunakan Model Jones yang telah dimodifikasi. Menurut Sri Sulistyanto (2008:226) Model Jones yang telah dimodifikasi merupakan metode pendeteksian manajemen laba yang secara statistik paling baik dan lebih kuat dibandingkan dengan metode pendeteksian manajemen laba lainnya.

Alasan penulis dalam pemilihan variabel karena pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai lindung nilai, *leverage*, manajemen laba dan agresivitas pajak terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian yang sudah dilakukan

memberikan hasil yang tidak konsisten, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas dan memprediksi apakah lindung nilai, *leverage*, manajemen laba akan mempengaruhi agresivitas pajak.

Hasil penelitian Bendi Devi & Subagio Efendi (2018) dan Yoojin Lee (2016) menemukan bahwa lindung nilai berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan hasil penelitian Furqon Nurhandono & Amrie Firmansyah (2017) menemukan bahwa lindung nilai tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian Furqon Nurhandono & Amrie Firmansyah (2017), Ruth Rogate Octaviani & Sofie (2018), dan Agus Taufik Hidayat & Eta Febriana Fitria (2018) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan hasil penelitian Liana Susanto, dkk (2018) dan Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya (2015) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian Furqon Nurhandono & Amrie Firmansyah (2017), Shelly Novitasari (2017), Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya (2015), dan Raisa Fitri & Mulyaningtyas (2018) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan hasil penelitian Alfred Amril, dan Dwi Puspita & Popy Fauziati (2015) menemukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Lindung Nilai, *Leverage*, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dengan berbagai cara antara lain menggunakan *transfer pricing*, penggunaan utang intra perusahaan, pengalihan royalti ke luar negeri, penggelembungan utang dan pengalihan keuntungan (*profit shifting*).
2. Tindakan agresivitas pajak disebabkan karena perusahaan ingin mengelola beban pajaknya serendah mungkin agar laba yang diperoleh maksimal.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan agresivitas pajak adalah berkurangnya pendapatan pajak yang diterima Negara sehingga target penerimaan perpajakan tidak tercapai.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana lindung nilai pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.
2. Bagaimana *leverage* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.
3. Bagaimana manajemen laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.

4. Bagaimana agresivitas pajak pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.
5. Seberapa besar pengaruh lindung nilai terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.
6. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.
7. Seberapa besar pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lindung nilai pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.
2. Untuk mengetahui *leverage* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.
3. Untuk mengetahui manajemen laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.
4. Untuk mengetahui agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh lindung nilai terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut :

1. Dengan mengetahui kondisi lindung nilai, *leverage*, manajemen laba, dan agresivitas pajak dapat memberikan masukan atas penyusunan kurikulum terbaru baik bagi pendidikan tingkat perguruan tinggi ataupun profesi, agar apa yang akan nanti dipelajari relevan dengan kondisi saat ini.
2. Dengan mengetahui pengaruh lindung nilai, *leverage*, manajemen laba terhadap agresivitas pajak diharapkan dapat menjadi salah satu referensi

akademis yang akan bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain :

1.4.2.1 Bagi Penulis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai lindung nilai sehingga penulis dapat memberikan saran kepada perusahaan mengenai kebijakan lindung nilai yang harus dilakukan agar perusahaan dapat meminimalisir resiko keuangan yang akan terjadi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *leverage* sehingga penulis dapat memberikan saran kepada perusahaan mengenai kebijakan tingkat *leverage* yang efektif sehingga hasil dari kepemilikan utang dapat memberikan dampak yang optimal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan aparat pemerintah terutama dalam hal agresivitas pajak.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai manajemen laba sehingga penulis dapat memberikan masukan kepada perusahaan mengenai tindakan manajemen laba

serta dampak yang akan terjadi jika perusahaan melakukan praktik tersebut.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai agresivitas pajak sehingga dapat membantu penulis dalam pekerjaan yang akan dilakukan terutama dalam hal yang berkaitan dengan agresivitas pajak.

1.4.2.2 Bagi Perusahaan

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bagi perusahaan agar dapat melakukan kebijakan lindung nilai secara efektif sehingga kepercayaan investor meningkat, risiko atas lindung nilai terjaga dan dapat meyakinkan aparat pemerintah dalam hal ada atau tidaknya agresivitas pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bagi perusahaan agar memiliki tingkat *leverage* yang efisien sehingga aktivitas pembiayaan dilakukan untuk meningkatkan laba tanpa mengurangi pajak yang harus dibayar kepada pemerintah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bagi perusahaan khususnya para *stakeholder* mengenai tindakan manajemen laba, sehingga para *stakeholder* bijak dalam memilih manajemen yang akan menjalankan perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian terutama di bidang perpajakan karena tindakan ini dapat menimbulkan kerugian dikemudian hari.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bagi perusahaan khususnya bagi manajemen mengenai ukuran agresivitas pajak, agar manajemen dapat mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan resiko pemeriksaan dari aparat pemerintah.

1.4.2.3 Bagi Pihak Lain

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemeriksa pajak terutama dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mendeteksi upaya-upaya perusahaan dalam mengurangi pembayaran pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk menyusun peraturan terkait perlakuan pajak untuk lindung nilai, *leverage* ataupun manajemen laba.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Penelitian ini dilakukan sejak bulan November 2019 hingga selesainya dilakukan penelitian.